

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

The Influence of Civil Servant Competence, Transparency, and Utilization of Information Technology on Budget Management Accountability at the Harbormaster's Office and Main Port Authority of Makassar

Muh. Aslam^{1*}, Mujahid², Abdul Samad A³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: aclam.alaicum@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Hasil penelitian ini menemukan dan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi) memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan anggaran). Hasil uji statistik secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hasil uji statistik secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran sebesar 78,6%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan di Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah baik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran.

Abstract

This study aims to determine the influence of Civil Servant Competence, Transparency, and Utilization of Information Technology on Budget Management Accountability at the Harbormaster's Office and Main Port Authority of Makassar. The results of this study found and showed that the three independent variables (civil servant competence, transparency, and utilization of information technology) had a positive influence on the dependent variable (budget management accountability). The results of a partial statistical test (t-test) indicate that apparatus competence has a positive and significant effect on budget management accountability, transparency has a positive and significant effect on budget management accountability, and the use of information technology has a positive and significant effect on budget management accountability. The results of a simultaneous statistical test (F-test) indicate that apparatus competence, transparency, and the use of information technology have a positive and significant effect on budget management accountability at the Makassar Harbormaster and Main Port Authority Office. Apparatus competence, transparency, and the use of information technology have a strong influence on budget management accountability, amounting to 78.6%. These results indicate that the apparatus competence, transparency, and the use of information technology implemented at the Makassar Harbormaster and Main Port Authority Office have been good and have made a significant contribution to the company.

Keywords: Apparatus Competence, Transparency, Utilization of Information Technology, Budget Management Accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi tolok ukur utama keberhasilan kinerja suatu instansi (Pratiwi et al., 2021). Akuntabilitas pengelolaan anggaran tidak sekadar mencakup kepatuhan administratif dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan juga sejauh mana kemampuan aparatur dalam merencanakan, merealisasikan, dan mengevaluasi dana publik agar tepat sasaran (Nurhidayat, 2024). Kegagalan dalam mengelola anggaran secara akuntabel berpotensi memicu inefisiensi, pemborosan, hingga penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan anggaran dituntut untuk terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan pelayanan publik dan kemajuan teknologi (Aziz & Wediyanto, 2024).

Dalam mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, terdapat tiga faktor determinan utama yang saling beririsan, yaitu kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pertama, kompetensi aparatur — yang mencakup pemahaman regulasi, keterampilan teknis, serta kemampuan analisis berbasis data — menjadi modal utama dalam eksekusi anggaran (Hertati, Samad, & Mujahid, 2023; Nurhidayat, 2022). Studi oleh Adonis (2023) membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan anggaran di sektor pelayanan publik. Kedua, transparansi anggaran sebagai prasyarat akuntabilitas memastikan bahwa setiap informasi alokasi dan realisasi dana dapat diawasi secara terbuka, yang terbukti secara positif memengaruhi kinerja keuangan melalui penerapan prinsip *value for money* (Nuha,

2022; Utomo, 2023). Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi modern memegang peranan krusial dalam meminimalkan *human error*, meningkatkan efisiensi proses, serta menciptakan rekam jejak audit yang terverifikasi secara elektronik (Long, Seran, & Toda, 2024; Naufal, Aisyah, & Budiati, 2023).

Sebagai lembaga strategis yang mengatur, mengawasi, dan memberikan pelayanan kepelabuhanan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar mengelola berbagai pos anggaran vital, mulai dari biaya operasional, pembangunan infrastruktur, hingga pendanaan program keselamatan pelayaran. Untuk mendukung transparansi dan efisiensi, KSOP Utama Makassar telah menerapkan integrasi sistem teknologi informasi nasional seperti SAKTI, SIMPONI, dan Inaportnet (Maudy, 2023; Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, 2024). Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan digital ini tentu menuntut kesiapan SDM yang kompeten agar realisasi anggaran tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga akuntabel secara kualitatif (Naim, Daga, & Samad, 2023; Laporan Tahunan KSOP Utama Makassar, 2023).

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti hubungan antara kompetensi, transparansi, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas secara terpisah maupun umum (Aziz & Wediyanto, 2024; Pratiwi et al., 2023), studi empiris yang mengintegrasikan ketiga variabel ini secara simultan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada institusi maritim dan kepelabuhanan masih terbatas. Karakteristik kerja KSOP yang dinamis dan berorientasi pada keselamatan serta pelayanan publik menjadikan investigasi pada instansi ini memiliki urgensi tinggi.

Berdasarkan kesenjangan empiris dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada Kantor KSOP Utama Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi literatur manajemen keuangan publik serta menjadi referensi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih profesional, transparan, dan terakselerasi oleh digitalisasi di sektor kepelabuhanan Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research* atau penelitian kausal untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di KSOP Utama Makassar. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian kausal digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen (kompetensi aparatur, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan anggaran) secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar. Temuan empiris ini diperkuat oleh data deskriptif yang menunjukkan bahwa indikator mengenai pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran sesuai dengan jadwal, prosedur, dan ketentuan memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 4,49, dengan 60,0% responden menyatakan sangat setuju. Capaian ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur di instansi tersebut telah terimplementasi secara nyata dalam bentuk kepatuhan prosedural dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas keuangan. Secara teoretis, hasil ini selaras dengan konsep *competency-based human resource management* dari Spencer (1993) yang menekankan dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pilar utama kinerja efektif. Fenomena kepatuhan prosedural ini juga divalidasi oleh teori *procedural rationality* (Simon, 1976), di mana ketaatan pada regulasi mencerminkan internalisasi kompetensi kognitif ke dalam perilaku organisasi. Selain itu, jika ditinjau dari *Resource-Based View (RBV) Theory* (Barney, 1991), sumber daya manusia yang kompeten bertindak sebagai aset strategis yang memperkuat efektivitas pengendalian internal sektor publik.

Temuan ini konsisten dengan studi Pratiwi et al. (2021) yang mencatat kontribusi kompetensi SDM sebesar 45,6% terhadap akuntabilitas, serta penelitian Syahrudin dan Tadjudin (2022) yang membuktikan adanya korelasi positif kompetensi dengan tingkat kepatuhan standar publik. Dampak nyata dari kompetensi prosedural ini juga didukung oleh Nurhayati dan Zulaikha (2023) yang melaporkan penurunan *error rate* laporan keuangan hingga 37%, dan Harahap et al. (2021) yang menemukan bahwa aparatur kompeten mampu mendeteksi potensi penyimpangan anggaran 2,5 kali lebih cepat. Dengan demikian, investasi kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan sangat krusial, karena terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas jangka panjang hingga 56% (Azhar & Darwanis, 2022).

2. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pengujian hipotesis selanjutnya membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kantor KSOP Utama Makassar. Berdasarkan analisis deskriptif, indikator mengenai penyampaian informasi perencanaan dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada pihak berkepentingan meraih skor rata-rata tertinggi sebesar 4,37, dengan 47,1% responden menyatakan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip keterbukaan informasi telah diterapkan secara substansial dalam praktik anggaran sehari-hari di lingkungan pelabuhan tersebut. Secara teoretis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), di mana transparansi bertindak sebagai instrumen kontrol untuk mereduksi asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat), sehingga menekan potensi *moral hazard*. Di samping itu, berdasarkan *Legitimacy Theory* (Suchman,

1995) dan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), keterbukaan informasi publik merupakan mekanisme krusial untuk membangun legitimasi dan memenuhi hak informasi pemangku kepentingan guna membentuk *accountability loop* yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Widyaningsih et al. (2021) yang mencatat koefisien determinasi transparansi sebesar 0,612 terhadap akuntabilitas keuangan. Temuan ini juga diperkuat oleh Rahayu dan Susanto (2022) yang membuktikan bahwa transparansi anggaran mampu menekan risiko korupsi hingga 42%. Keterbukaan informasi yang proaktif ini terbukti meningkatkan partisipasi pengawasan publik sebesar 58% (Fitriani & Nasir, 2023) serta mengoptimalkan akurasi audit eksternal (Santoso et al., 2021). Efektivitas pengelolaan berbasis transparansi ini dikonfirmasi pula oleh Hidayat dan Zarkasyi (2022) yang menunjukkan bahwa instansi dengan tingkat keterbukaan tinggi memiliki indeks SAKIP 3,2 kali lebih baik dibandingkan instansi dengan tingkat transparansi yang rendah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor KSOP Utama Makassar. Berdasarkan analisis deskriptif, indikator yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempercepat penyusunan laporan anggaran memperoleh skor tertinggi sebesar 4,34, dengan 47,1% responden menyatakan sangat setuju. Data ini membuktikan bahwa digitalisasi ekosistem keuangan di KSOP Utama Makassar memberikan dampak konkret bagi efisiensi kerja aparatur. Keberhasilan adopsi teknologi ini selaras dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) serta *Diffusion of Innovation Theory* (Rogers, 2003), di mana aspek *relative advantage* berupa kecepatan dan akurasi mampu mempercepat penyusunan laporan keuangan sehingga pelaporan menjadi lebih tepat waktu (*timely*). Secara teoretis, melalui *Information Processing Theory* (Galbraith, 1974), integrasi teknologi informasi meningkatkan kapasitas instansi dalam mengolah data finansial secara akurat dan menciptakan rekam jejak digital (*digital footprint*) yang kuat untuk meminimalkan risiko manipulasi data keuangan.

Temuan ini mendukung studi Mahmudi dan Kusuma (2021) yang mengonfirmasi pengaruh signifikan digitalisasi terhadap akuntabilitas dengan koefisien determinasi sebesar 0,587. Selain itu, Nugroho et al. (2022) menambahkan bahwa teknologi informasi mampu mereduksi *error rate* data hingga 67% dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan hingga 89%. Implementasi sistem informasi digital juga mempercepat proses pelaporan hingga 3,5 kali lebih cepat dibanding metode konvensional (Sari & Wibowo, 2023). Integrasi aplikasi nasional seperti SAKTI, SIMPONI, dan Inaportnet terbukti mempermudah sinkronisasi data secara otomatis serta menghasilkan *audit trail* yang komprehensif (Prasetyo et al., 2021), yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan standar akuntabilitas 2,8 kali lebih tinggi dibanding sistem manual (Wijaya & Putra, 2022).

4. Pengaruh Simultan Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Secara simultan, pengujian membuktikan bahwa kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor KSOP Utama Makassar. Hubungan simultan ini dapat dijelaskan secara komprehensif melalui *Systems Theory* (Katz & Kahn, 1978), yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang keberhasilannya ditentukan oleh integrasi berbagai subsistem yang saling memperkuat. Dalam konteks ini, kompetensi aparatur sebagai *human capital*, transparansi sebagai mekanisme *governance*, dan teknologi informasi sebagai *infrastructure* berkolaborasi membentuk efek multiplikatif untuk menciptakan ekosistem akuntabilitas yang kokoh. Keterkaitan ini juga dipertegas oleh *Contingency Theory* (Donaldson, 2001) mengenai pentingnya keserasian (*organizational fit*) antara kapasitas SDM, keterbukaan informasi, dan kesiapan sistem digital dalam menghadapi tuntutan lingkungan kerja kepelabuhanan yang dinamis.

Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian Kusuma et al. (2021) yang menemukan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 78,4% terhadap akuntabilitas. Sinergi ini juga terbukti meningkatkan indeks akuntabilitas 4,2 kali lebih tinggi dibandingkan jika instansi hanya berfokus pada salah satu atau dua faktor saja secara parsial (Wulandari & Aziz, 2022). Keselarasan organisasional yang optimal dari ketiga variabel ini menghasilkan efek interaksi positif sebesar 0,34 (Hartono & Putranto, 2023), yang berkontribusi pada penurunan temuan audit hingga 73% serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Ramadhan et al., 2021). Dari perspektif efisiensi biaya, investasi yang proporsional pada aspek SDM, transparansi, dan infrastruktur digital memberikan dampak balik yang optimal dengan rasio manfaat-biaya (*cost-benefit ratio*) mencapai 1:4,8 (Setiawan & Nurhasanah, 2022). Berdasarkan temuan tersebut, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kantor KSOP Utama Makassar tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus menggunakan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan ketiga pilar tersebut secara simultan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
4. Kompetensi aparatur, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adonis, A. P. (2023). Pengelolaan Dana Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran di Sektor Pelayanan Publik. Skripsi, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. http://repository.pip-semarang.ac.id/5407/2/561911337471K_SKIRPSI_OPEN_ACCESS.pdf
2. Azhar, M., & Darwanis. (2022). Pengaruh kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-62.
3. Aziz, S., & Wediyanto, E. (2024). The influence of transparency, accountability, human resource competence, technological innovation, and public participation on local government financial performance. *Priviet Social Sciences Journal*, 4(12), 1-15. <https://doi.org/10.55942/pssj.v4i12.347>
4. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
5. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. (2023). Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2022. Retrieved from https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20230522114140.LAPORAN_KEUANGAN_DITJEN_HUBLA_TAHUN_2022.pdf
7. Ditjen Perhubungan Laut. (2022). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
8. Ditjen Perhubungan Laut. (2023). Laporan Tahunan KSOP Utama Makassar Tahun 2023. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
9. Fajriansyah, Y., & Alexander, S. W. (2018). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada pelayanan publik di KSOP Kelas I Bitung. *Jurnal Ilmiah [ejournal.unsrat.ac.id]*.
10. Fitriani, R., & Nasir, M. (2023). Transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 112-128.
11. Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
12. Galbraith, J. R. (1974). Organization design: An information processing view. *Interfaces*, 4(3), 28-36.
13. Harahap, D. S., Lubis, A. F., & Siregar, H. (2021). The role of human resource competency in preventing budget misuse. *Journal of Public Sector Innovations*, 6(2), 134-149.
14. Hertati, H., Samad, A., & Mujahid, M. (2023). Civil servant competency development at the Human Resources Development and Personnel Agency. *Journal La Bisecoman*, 4(5), 226-237.
15. Hidayat, A. S., & Zarkasyi, W. (2022). Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 203-221.
16. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (2024). Buletin Transparansi 2024, Vol. 24 No. 2. Tersedia secara daring di: https://itjen.kemenhub.go.id/wp-content/uploads/Buletin/Transparansi-2024_02.pdf
17. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. (2024). Laporan Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Tahun 2024. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

16. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
17. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. (2023). Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Pokok Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tahun Anggaran 2023. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diakses dari https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopumakassar/documents/post/22192/1aporan_tahun_2023.pdf
18. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2022. Tersedia secara daring di: <https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi->